



# SOSIALISASI PERDA PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Oleh:

KOMISI I DPRD  
KABUPATEN MAGELANG

# DASAR HUKUM

## **1. PEMBUKAAN UUD RI TAHUN 1945**

## **2. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011**

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara

## **3. PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2012**

Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

# LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

# LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Magelang, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

# LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Magelang baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Hingga saat ini, Kabupaten Magelang sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.


# PENYELENGGARAAN PPWK

- Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat.

# PEMBENTUKAN PPWK

- 1. Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.**
- 2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati**
- 3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:**
  - Instansi Vertikal**
  - Unsur Perangkat Daerah**
  - Unsur Masyarakat**
  - Perguruan Tinggi**
  - Organisasi Politik yang memiliki Kursi di DPRD (PARPOL)**
  - Media Massa Lokal**

# SASARAN PPWK

1. **APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**
  2. **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
  3. **KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**
  4. **KARYAWAN BUMD**
  5. **ORGANISASI POLITIK**
  6. **PESERTA DIDIK/SANTRI/MAHASISWA**
  7. **TOKOH AGAMA/MASYARAKAT/PEMUDA/ADAT**
- 



# BENTUK KEGIATAN PPWK

1. **Pendidikan Dan Pelatihan;**
2. **Kegiatan Kebudayaan Dan Kesenian;**
3. **Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Bimbingan Teknis;**
4. **Kemah Kebangsaan/Outbond;**
5. **Peringatan Hari Lahir Pancasila;**
6. **Peringatan Hari Besar Nasional;**
7. **Lomba Cerdas Cermat;**
8. **Permainan;**
9. **Diskusi/Dialog;**
10. **Pembentukan Kampung Pancasila Di Setiap Desa/Kelurahan; Dan**
11. **Kegiatan Lain Yang Mendukung Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.**



MATERI  
PPWK

- PANCASILA
- UUD 1945
- BHINNEKA  
TUNGGAL IKA
- NKRI



AKHIRNYA:  
MASYARAKAT YANG  
ADIL, MAKMUR &  
SEJAHTERA DAPAT  
TERWUJUD.

DRD KABUPATEN  
MAGELANG



- DPRD KAB. MAGELANG

TERIMA KASIH